



Pemikiran Islam Soekarno: Dari Klaim Komunis Hingga Rekonsiliasi Negara Kesatuan

Awaluddin

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

awalu6008@gmail.com

Abstract

This study discusses the concept of a unitary state within the framework of Islamic ideology from the perspective of Soekarno. The study aims to analyze Soekarno's thoughts regarding the relationship between Islam, nationalism, and national unity within the context of Indonesia's pluralistic society. The research employs a library research method with a qualitative-descriptive approach through the analysis of relevant works, speeches, and ideas of Soekarno. The findings indicate that Soekarno viewed Islam as a moral and social value capable of strengthening national unity without necessarily establishing Indonesia as a religious state. According to Soekarno, the concept of a unitary state is built upon the principles of unity, mutual cooperation, and tolerance, which are in harmony with the universal values of Islam. Thus, Soekarno's thought positions Islam as an ethical force in maintaining the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia amidst societal diversity.

Keywords: Unitary State, Islamic Ideology, Soekarno, Nationalism.

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep negara kesatuan dalam bingkai ideologi Islam menurut perspektif Soekarno. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Soekarno mengenai hubungan antara Islam, nasionalisme, dan persatuan negara dalam konteks Indonesia yang majemuk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis terhadap karya, pidato, dan pemikiran Soekarno yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Soekarno memandang Islam sebagai nilai moral

dan sosial yang mampu memperkuat persatuan bangsa tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Konsep negara kesatuan menurut Soekarno dibangun atas dasar persatuan, gotong royong, dan toleransi yang selaras dengan nilai-nilai universal Islam. Dengan demikian, pemikiran Soekarno menempatkan Islam sebagai kekuatan etis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keberagaman masyarakat.

Kata Kunci: Negara Kesatuan, Ideologi Islam, Soekarno, Nasionalisme.

PENDAHULUAN

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah tugas monumental yang memerlukan tidak hanya kecakapan politik dan strategi, tetapi juga kemampuan untuk menyelaraskan berbagai perspektif ideologis. Salah satu tokoh penting dalam proses ini adalah Soekarno, presiden pertama dan proklamator kemerdekaan Indonesia. Visi Soekarno tentang Indonesia yang bersatu sangat dipengaruhi oleh pemikirannya tentang rekonsiliasi, khususnya dalam kerangka ideologi Islam. Soekarno menyadari pentingnya menciptakan identitas nasional yang kohesif yang dapat mencakup keragaman etnis, agama, dan budaya yang luas di Indonesia. Pendekatan rekonsiliasinya bukan hanya strategi politik tetapi juga komitmen ideologis yang mendalam terhadap inklusivitas dan persatuan (Aminullah, 2020). Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip negara kesatuan dengan nilai-nilai Islam, Soekarno bertujuan untuk mengurangi konflik ideologis dan memupuk rasa solidaritas nasional.

Idealnya, mengingat Indonesia memiliki basis Islam yang kuat, negara yang dibangun bisa berdasarkan format Islam. Ini akan mencerminkan mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam dan memungkinkan implementasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola negara. Namun, realitanya, Indonesia justru menganut sistem negara kesatuan yang berazaskan demokrasi, di mana berbagai ideologi dan agama diakomodasi dalam kerangka kebangsaan yang inklusif. Begitu juga dengan selogan musyawarah dalam demokrasi, bukankah Indonesia mengedepankan mufakat atau suara terbanyak, namun mengapa Keputusan Soekarno seakan mutlak dan tidak ada yang dapat membantahnya (Jamil et al., 2017). Padahal, pahlawan dan tokoh proklamasi pada saat itu, mayoritas adalah kalangan Muslim dan menginginkan Indonesia sebagai negara syari'at. Fenomena di atas kembali menemukan pertanyaan, apakah memang Soekarno alergi dengan istilah Islam, atau memang tidak menemukan tawaran ideal bentuk negara Islam yang diformulasikan oleh panitia perumus kemerdekaan Indonesia.

Berangkat dari masalah di atas, penelitian mencoba mengeksplorasi pemikiran rekonsiliasi Soekarno dan penerapannya dalam konteks pembentukan NKRI. Penelitian ini mengkaji bagaimana integrasi ideologi Islam oleh Soekarno memengaruhi strategi dan kebijakan politiknya yang bertujuan untuk menyatukan bangsa. Melalui analisis pidato, tulisan, dan sikap ideologisnya, penelitian ini

memberikan gambaran tentang upaya Soekarno dalam membangun negara yang inklusif namun menghormati prinsip-prinsip Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Soekarno mengembangkan gagasan rekonsiliasi yang mengakomodasi keberagaman ideologi dan agama di Indonesia, sambil mempertahankan kesatuan dan integritas negara. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk berkembang sebagai negara kesatuan yang tetap inklusif terhadap berbagai kelompok sosial dan keagamaan.

Kajian tentang Soekarno dan Islam bukanlah wacana terbaru, sudah banyak para peneliti yang membahas dan mengkajinya dengan berbagai metode dan pendekatan. Samingan dalam jurnalnya yang berjudul; *“Spiritualitas Islam Dalam Kajian Pemikiran Soekarno,”* telah membahas dengan sangat terstruktur bagaimana Soekarno mempelajari dan banyak mengkaji tentang konsep-konsep Islam. Salah satunya, kemunduran negara-negara Islam hari ini adalah karena kurangnya peran dan penghargaan terhadap akal sehingga Islam semakin terdiskreditkan di masa modern (Samingan, 2021). Karya Samingan memiliki kesamaan dengan penulis, yakni sama-sama mengeksplorasi perhatian Soekarno terhadap konsep Islam. Perbedaannya, jika Samingan menonjolkan dimensi Islam rasionalnya Soekarno, penulis lebih fokus dalam menekankan sejauh mana Soekarno peduli terhadap gagasan negara yang berazaskan Islam.

Muhammad Mawangir dalam publikasi yang berjudul; *“Soekarno Dan Pemikirannya Tentang Agama, Politik, Dan Pendidikan Islam,”* telah mendeskripsikan dengan sangat baik, bagaimana Soekarno sangat futuristik dalam memahami konsep Islam. Apa yang digagas dan dilakukan Soekarno jauh dari pemikiran orang-orang di masanya, salah satunya bagaimana kedaulatan sebuah negara (masa depan) ditentukan oleh azas dan nilai-nilai keislamannya, bukan sebatas karena nama Islam itu sendiri sementara isi di dalamnya rapuh (jauh dari implementasi Islam) (Mawangir, 2016). Publikasi Mawangir di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis khususnya dalam konteks agama dan politik Islam Soekarno. Perbedaannya, jika Mawangir sangat menekankan dimensi pendidikan Islam dan urgensinya, penulis lebih intens dalam merevitalisasikan konsep politik Soekarno yang sering mengambil konsep Islam.

Anwar Sanusi pada tulisannya yang berjudul; *“Sikap dan Kebijakan Soekarno Terhadap Islam Pasca Kemerdekaan,”* telah menceritakan panjang lebar bagaimana kiprah dan grafik politik Soekarno menyikapi anomaly perlawanan terhadap Indonesia yang mengadopsi sistem negara kesatuan. Pada tulisan tersebut dijabarkan bagaimana Soekarno jatuh-bangun dalam memetakan konsep yang ideal bagi bangsa, mulai dari demokrasi terpimpin, hingga konsep integrasi antara nasionalisme, agama, dan sosial (Sanusi, 2018). Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis, khususnya bagaimana menonjolkan sisi kebijaksanaan Soekarno untuk tetap menjaga keutuhan NKRI dari rongrongan ideologi internal. Perbedaannya, jika Anwar Sanusi menjabarkan penelitian berdasarkan pendekatan historis, penulis lebih fokus dalam menarasikannya dalam pendekatan deskriptif analisis terhadap pemikiran Islam Soekarno. Setelah melakukan berbagai eksplorasi karya yang pernah ada, tiga tulisan di atas adalah

publikasi yang paling dekat dengan pembahasan penulis. Begitu juga secara kuantitatif, penulis telah menganalisa puluhan karya yang memiliki variabel identik, namun demikian, belum ditemukan satu karya pun yang membahas tentang 'reconciler thought' Soekarno dalam konteks pemikiran Islamnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa artikel ini memiliki originalitas dan novelti.

METODE PENELITIAN

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif. Sumber primer dalam tulisan ini adalah artikel ilmiah tentang pemikiran Islam Soekarno khususnya terbitan 5 tahun terakhir. Sumber sekunder adalah tulisan-tulisan tentang Soekarno pada media-media non-ilmiah seperti koran, website, majalah, dan lain-lain. Sistem penyusunan artikel ini dilakukan secara tematik, artinya penulis memetakan tulisan terkait Soekarno berdasarkan tema-tema kecil dalam bingkai Pemikiran Islam dan Negara Kesatuan. Selanjutnya disusun persub-judulnya dengan menggunakan pola deduktif (khusus-umum) guna memudahkan pembaca dalam menangkap core dari esensi tulisan.

PEMBAHASAN

1. Sekilas Tentang Soekarno

Soekarno, yang lahir dengan nama Koesno Sosrodihardjo pada 6 Juni 1901 di Surabaya, adalah putra dari pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo, seorang guru sekolah rendah, dan Ida Ayu Nyoman Rai, seorang wanita berdarah Bali. Keluarganya merupakan campuran budaya Jawa dan Bali, memberikan Soekarno latar belakang budaya yang kaya dan beragam. Saat kecil, kesehatannya tidak terlalu baik, dan dia sering sakit-sakitan (Kurniawan & Mahardi, 2024). Karena kesehatan yang buruk, namanya diganti menjadi Soekarno, karena diyakini bahwa perubahan nama akan membawa perubahan nasib. Soekarno tumbuh dalam suasana yang mendidik dan penuh semangat nasionalis. Ayahnya sangat menghormati kebudayaan Jawa dan memiliki pandangan nasionalis yang kuat, sementara ibunya mengajarkan nilai-nilai spiritual Bali.

Soekarno mengenyam pendidikan dasar di Mojokerto, dan kemudian melanjutkan pendidikan menengah di HBS (Hoogere Burger School) di Surabaya. Di HBS, Soekarno tinggal bersama HOS Tjokroaminoto, seorang tokoh pergerakan nasional yang berpengaruh. Dari sinilah Soekarno mulai tertarik dengan politik dan nasionalisme. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Soekarno melanjutkan studi ke Technische Hoogeschool te Bandoeng (sekarang Institut Teknologi Bandung) pada tahun 1921, di mana ia belajar teknik sipil. Selama masa kuliahnya, Soekarno semakin aktif dalam pergerakan nasionalis. Dia mendirikan kelompok studi yang disebut Algemene Studie Club pada tahun 1926, yang menjadi salah satu cikal bakal Partai Nasional Indonesia (PNI).

Pada tahun 1927, Soekarno bersama dengan beberapa rekannya mendirikan PNI, sebuah partai yang berfokus pada perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. PNI tumbuh pesat dan segera menjadi salah satu organisasi politik paling berpengaruh di Indonesia. Aktivitas politik Soekarno menarik perhatian pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1929, Soekarno ditangkap dan diadili atas tuduhan menghasut rakyat untuk memberontak. Ia dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun, namun dibebaskan pada tahun 1931 setelah menjalani dua tahun penahanan (Biliu, 2017). Namun, perjuangan Soekarno tidak berhenti di situ. Setelah pembebasannya, ia kembali aktif dalam politik dan beberapa kali ditangkap dan diasingkan oleh Belanda, termasuk pengasingan di Ende, Flores, dan Bengkulu.

Perjuangan Soekarno mencapai puncaknya pada masa pendudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II. Jepang, yang menduduki Indonesia pada tahun 1942, memberikan sedikit kebebasan politik kepada para pemimpin nasionalis Indonesia sebagai bagian dari strategi mereka. Pada masa ini, Soekarno dan Mohammad Hatta berhasil memanfaatkan situasi untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menandai lahirnya Republik Indonesia, dengan Soekarno sebagai presiden pertamanya dan Hatta sebagai wakil presiden. Namun, kemerdekaan ini tidak serta merta diakui oleh Belanda, yang kemudian menyebabkan terjadinya perjuangan diplomasi dan militer selama beberapa tahun untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Sebagai presiden, Soekarno memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional Indonesia. Ia memperkenalkan konsep "Nasakom" (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai dasar ideologi negara untuk menyatukan berbagai elemen dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Soekarno juga dikenal dengan gagasan-gagasannya yang revolusioner dan visinya tentang Indonesia yang kuat dan mandiri. Dalam pidatonya yang terkenal, 'Indonesia Menggugat,' Soekarno mengecam kolonialisme dan imperialisme, serta mendorong persatuan bangsa Indonesia untuk melawan penindasan (Samingan, 2022).

Selama masa pemerintahannya, Soekarno menerapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk membangun kemandirian ekonomi dan politik Indonesia. Dia memprakarsai berbagai proyek pembangunan besar seperti pembangunan Monumen Nasional (Monas), Gelora Bung Karno, dan Hotel Indonesia. Namun, kebijakan ekonomi yang ambisius ini sering kali tidak didukung oleh basis ekonomi yang kuat, sehingga menimbulkan berbagai masalah. Soekarno juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang karismatik dan sering menggunakan retorika yang kuat dalam pidatonya. Ia berusaha menempatkan Indonesia sebagai negara yang berperan penting di kancah internasional melalui Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 di Bandung, yang menghasilkan Deklarasi Bandung sebagai dasar solidaritas dan kerjasama negara-negara Asia dan Afrika.

Kepemimpinan Soekarno mulai menghadapi tantangan serius pada awal 1960-an. Ketidakstabilan ekonomi, konflik internal, dan ketegangan dengan

militer meningkat. Pada tahun 1965, terjadi peristiwa G30S/PKI, di mana sejumlah jenderal militer dibunuh. Meskipun keterlibatan Soekarno dalam peristiwa ini masih menjadi perdebatan, peristiwa ini digunakan oleh Jenderal Suharto untuk mengambil alih kekuasaan (Nurdin, 2016). Pada tahun 1967, Soekarno secara resmi dicopot dari jabatannya sebagai presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan digantikan oleh Suharto. Soekarno kemudian menjalani masa tahanan rumah di Jakarta hingga akhir hayatnya pada 21 Juni 1970.

Warisan Soekarno tetap kuat dalam sejarah dan budaya Indonesia. Ia dianggap sebagai Bapak Proklamasi dan Pahlawan Nasional yang memimpin perjuangan bangsa menuju kemerdekaan. Soekarno juga dikenal karena visinya tentang persatuan dan keberagaman Indonesia, yang tercermin dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Selain itu, gagasan-gagasan Soekarno tentang anti-kolonialisme dan kemandirian nasional terus menginspirasi generasi muda Indonesia dan gerakan-gerakan nasionalis di seluruh dunia. Patung dan monumen Soekarno, termasuk Monas dan Gelora Bung Karno, masih berdiri sebagai simbol dari perjuangannya untuk kemerdekaan dan persatuan bangsa (Usman, 2021). Soekarno bukan hanya seorang politisi dan orator ulung, tetapi juga seorang pemikir yang memiliki visi besar untuk Indonesia dan dunia. Kehidupannya yang penuh liku dan kontribusinya yang tak ternilai menjadikan Soekarno sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia dan perjuangan kemerdekaan global.

2. Klaim Komunis dan Sekularisasi

Bag Soekarno, sebagai seorang pemimpin karismatik dan revolusioner, sering kali menjadi sasaran berbagai tuduhan dan kontroversi sepanjang masa kepemimpinannya. Dua tuduhan yang paling menonjol adalah bahwa ia cenderung pada komunisme dan sekularisasi. Tuduhan-tuduhan ini muncul dari berbagai kebijakan dan sikap politiknya, serta dinamika politik global dan domestik yang kompleks pada masa itu. Soekarno sering dituduh sebagai komunis karena kedekatannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan hubungan baiknya dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan Tiongkok (Kembaren, 2021). Pada masa kepemimpinannya, Soekarno mengembangkan konsep "Nasakom," yang merupakan singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Konsep ini bertujuan untuk menyatukan berbagai elemen ideologis di Indonesia dan mencegah perpecahan di antara mereka. Soekarno percaya bahwa persatuan ini penting untuk menjaga stabilitas negara yang baru merdeka dan menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri.

Namun, pendekatan ini menimbulkan kecurigaan dari kelompok-kelompok yang anti-komunis, baik di dalam negeri maupun dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat yang sedang berada dalam puncak Perang Dingin. Kedekatan Soekarno dengan PKI, yang merupakan salah satu partai komunis terbesar di dunia pada waktu itu, membuat banyak orang percaya bahwa

Soekarno memiliki kecenderungan komunis. Pada kenyataannya, Soekarno bukanlah seorang komunis. Ia lebih merupakan seorang nasionalis yang pragmatis yang melihat PKI sebagai salah satu kekuatan politik yang bisa ia gunakan untuk memperkuat posisinya dan menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia. Selain itu, hubungan Soekarno dengan negara-negara komunis juga didorong oleh keinginan untuk mencari dukungan internasional di tengah tekanan dari negara-negara Barat. Setelah Indonesia merdeka, Soekarno merasa perlu membangun hubungan diplomatik dengan berbagai negara untuk mendapatkan bantuan ekonomi dan militer. Uni Soviet dan Tiongkok, sebagai negara-negara komunis besar, menawarkan bantuan yang signifikan kepada Indonesia, yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan nasional.

Tuduhan sekularisasi terhadap Soekarno juga tidak terlepas dari kebijakan dan pandangan politiknya. Sebagai seorang pemimpin yang berusaha mengedepankan persatuan nasional, Soekarno sering kali mengadopsi pendekatan yang inklusif terhadap berbagai kelompok agama di Indonesia. Ia berusaha menyeimbangkan peran agama dalam kehidupan politik dan sosial dengan nilai-nilai kebangsaan dan kemodernan. Namun, pendekatan ini sering disalahartikan sebagai upaya untuk mengurangi peran agama dalam kehidupan publik. Salah satu contoh kebijakan Soekarno yang menimbulkan tuduhan sekularisasi adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, menggantikan Konstitusi Sementara 1950 (Samingan, 2021). Meskipun Dekrit ini bertujuan untuk mengakhiri ketidakstabilan politik dan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pemerintahan, banyak kelompok Islam melihatnya sebagai langkah untuk mengurangi pengaruh Islam dalam politik. Mereka merasa bahwa Dekrit tersebut mengabaikan Piagam Jakarta, yang mengandung klausul tentang kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariat Islam.

Kritik lain terhadap Soekarno terkait sekularisasi muncul dari upayanya untuk mempromosikan kebudayaan nasional yang bersifat inklusif dan non-sektarian. Ia mendukung berbagai inisiatif kebudayaan yang mencerminkan keberagaman Indonesia, termasuk seni, sastra, dan tradisi dari berbagai kelompok etnis dan agama. Soekarno percaya bahwa kebudayaan nasional harus mencerminkan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya satu kelompok tertentu. Namun, pendekatan ini sering dianggap oleh kelompok-kelompok agama konservatif sebagai bentuk pengaburan identitas agama dan upaya untuk mempromosikan sekularisme (van der Kroef, 1973). Kedua tuduhan ini, baik mengenai komunisme maupun sekularisasi, juga dipengaruhi oleh dinamika politik global pada masa itu. Perang Dingin menciptakan ketegangan antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Di tengah situasi ini, setiap pemimpin yang menunjukkan sedikit saja kedekatan dengan komunisme segera dicurigai dan dicap sebagai komunis. Begitu pula dengan sekularisasi, di mana negara-negara dengan mayoritas Muslim menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan modernitas dan tradisi agama.

Khusus di dalam negeri, tuduhan-tuduhan ini digunakan oleh lawan-lawan politik Soekarno untuk melemahkan posisinya. Kelompok-kelompok militer dan Islam konservatif, yang merasa terancam oleh kebijakan-kebijakan inklusif Soekarno, menggunakan isu-isu ini untuk memobilisasi dukungan melawan Soekarno. Ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi dan politik Soekarno juga turut memperkuat tuduhan-tuduhan ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa Soekarno tidak pernah secara resmi mengidentifikasi dirinya sebagai seorang komunis atau sekuler. Dia selalu menekankan bahwa dirinya adalah seorang nasionalis yang berjuang untuk persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Dia melihat dirinya sebagai seorang pemimpin yang harus mengakomodasi berbagai ideologi dan kepentingan untuk menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa.

3. Pro dan Kontra Pemikiran Soekarno

Pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, hubungan antara Soekarno dengan cendekiawan Islam menjadi salah satu dinamika yang krusial dalam perjalanan politik dan sosial negara baru ini. Soekarno, sebagai tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan, memiliki visi yang luas untuk membangun negara yang bersatu dan merdeka, sementara cendekiawan Islam mewakili suara dari komunitas agama yang memiliki kekhawatiran terhadap peran Islam dalam struktur negara yang baru. Pada satu sisi, Soekarno, dengan latar belakang nasionalis yang kuat, menempatkan kesatuan dan persatuan bangsa di atas segalanya (Fadhil, 2014). Visinya tertuang dalam Pancasila, yang dianggapnya sebagai landasan yang inklusif untuk mempersatukan Indonesia yang multietnis dan multikultur. Soekarno percaya bahwa Pancasila mencerminkan nilai-nilai universal yang bisa diterima oleh semua warga Indonesia, termasuk umat Islam, dan menjadi dasar untuk membangun bangsa yang adil dan makmur.

Pada sisi lain, cendekiawan Islam, seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, dan Mohammad Natsir, memiliki pandangan yang berbeda. Mereka menganggap bahwa Pancasila tidak cukup mewakili prinsip-prinsip Islam yang seharusnya menjadi landasan negara. Mereka lebih mendukung penerapan syariat Islam dalam pembentukan hukum dan kebijakan negara sebagai cara untuk memastikan keadilan sosial dan moralitas publik yang sesuai dengan ajaran Islam. Perbedaan pandangan ini sering memunculkan konflik dan perdebatan yang intens antara pemerintah Soekarno dan para cendekiawan Islam. Meskipun mereka semua memiliki komitmen untuk memajukan Indonesia, perbedaan dalam interpretasi terhadap peran Islam dalam negara sering kali menjadi halangan yang sulit diatasi dalam merumuskan kebijakan nasional.

No	Cendekiawan Pro	Cendekiawan Kontra
1	Haji Agus Salim; Mendukung visi kesatuan Indonesia di bawah Pancasila.	Ki Bagus Hadikusumo; Memiliki pandangan kritis terhadap Pancasila sebagai dasar negara yang sekuler.

2	Muhammad Hatta; Percaya Pancasila sebagai landasan negara yang inklusif.	Wahid Hasyim; Menarik dukungan terhadap Pancasila karena dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai Islam.
3	Mas Mansur; Mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia.	Mohammad Natsir; Menentang Pancasila dan mendorong penerapan syariat Islam yang lebih eksplisit.

Tabel 01, pro dan kontra Soekarno

Namun demikian, dalam dinamika ini juga terlihat upaya-upaya untuk mencapai kesepakatan dan kompromi yang melayani kepentingan bersama. Soekarno, meskipun tidak secara eksplisit mengadopsi negara Islam formalistik, tetap memperhatikan peran penting Islam dalam kehidupan masyarakat dan berusaha untuk membangun kerjasama dengan komunitas Muslim. Sebaliknya, cendekiawan Islam juga berusaha untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional dengan mengartikulasikan pandangan mereka secara kritis terhadap kebijakan negara (Mawangir, 2016). Dalam konteks ini, perdebatan antara Soekarno dan cendekiawan Islam tidak hanya mencerminkan tantangan dalam membangun negara baru yang pluralis, tetapi juga mencerminkan dinamika yang kaya dan kompleks dalam perjalanan sejarah Indonesia. Dengan adanya dialog dan interaksi antara berbagai kelompok pemikir dan pemimpin, Indonesia berhasil menemukan titik tengah yang mengakomodasi kepentingan semua pihak, meskipun tidak selalu tanpa gesekan dan perbedaan pendapat yang signifikan.

Pada era modern, dinamika pro dan kontra terhadap pemikiran Soekarno tentang Islam terus berlanjut dengan melibatkan partai politik dan tokoh-tokoh yang mempengaruhi arus pemikiran di Indonesia. Soekarno, dengan visi inklusifnya tentang negara, diterima secara positif oleh Partai Nasional Indonesia (PNI), yang ia dirikan. PNI mendukung Pancasila sebagai dasar negara yang menyatukan semua elemen masyarakat Indonesia tanpa membedakan agama. Demikian pula, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mewarisi semangat partai-partai Islam tradisional, mendukung prinsip kebebasan beragama dan inklusivitas dalam negara (Diah & Cholil, 2008). Namun, tidak semua pihak setuju dengan pendekatan Soekarno. Partai Masyumi, yang didominasi oleh cendekiawan Islam, menentang ideologi sekuler dan melihat Pancasila sebagai penghalang bagi penerapan syariat Islam yang lebih eksplisit dalam hukum negara. Mereka menegaskan bahwa negara seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang lebih tegas dalam berbagai aspek kehidupan.

Saat ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai representasi dari gerakan Islam politik modern, mengusung visi Islamis yang lebih ketat dalam pengaruhnya terhadap kebijakan negara. Mereka mempromosikan nilai-nilai Islam yang kuat dalam hukum dan kebijakan publik sebagai landasan moral yang harus diikuti oleh negara. Dinamika ini mencerminkan spektrum opini yang beragam di masyarakat

Indonesia mengenai peran agama dalam kehidupan publik. Meskipun banyak yang masih menghargai warisan Soekarno dalam membangun fondasi negara yang inklusif, perdebatan tentang peran Islam dalam negara tetap menjadi topik yang sensitif. Kompromi dan dialog tetap diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang memadai dalam menjaga harmoni antaragama dan memajukan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan berkeadilan.

4. Pemikiran Islam Soekarno

Soekarno, sebagai salah satu pendiri bangsa dan Presiden pertama Indonesia, memiliki pemikiran yang mendalam dan komprehensif tentang Islam. Pemikiran ini terbentuk dari perjalanan hidupnya yang penuh dengan pengalaman intelektual dan spiritual, serta pengamatannya terhadap dinamika sosial-politik di Indonesia dan dunia. Pandangan Soekarno tentang Islam bukan hanya sekadar refleksi religiusitas pribadinya, tetapi juga merupakan bagian integral dari visinya untuk membangun Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, dan adil. Sejak masa muda, Soekarno telah tertarik pada pemikiran Islam. Ia membaca karya-karya tokoh Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, yang mendorong pemikiran progresif dan reformasi dalam Islam (Satriya et al., 2019). Al-Afghani dan Abduh adalah pemikir Islam yang berpendapat bahwa umat Islam harus bangkit dari keterbelakangan dengan mengadopsi ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai kemajuan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam. Pemikiran ini sangat mempengaruhi Soekarno dan membentuk pandangannya bahwa Islam harus menjadi kekuatan yang dinamis dan progresif dalam masyarakat.

Soekarno melihat Islam sebagai agama yang sangat relevan dan memiliki potensi besar dalam pembangunan bangsa. Ia percaya bahwa nilai-nilai Islam, seperti keadilan sosial, persaudaraan, dan kesejahteraan umat, sangat sejalan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Menurut Soekarno, Islam mengajarkan pentingnya solidaritas sosial dan kesejahteraan bersama, yang sangat diperlukan dalam membangun bangsa yang baru merdeka. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa Islam harus menjadi kekuatan moral yang mendorong perubahan sosial dan politik yang positif (Aminullah, 2020). Namun, Soekarno juga menyadari bahwa Islam harus dipahami secara kontekstual dan tidak kaku. Ia menekankan pentingnya memahami esensi ajaran Islam dan menerapkannya sesuai dengan konteks zaman dan kondisi sosial yang ada. Soekarno sering mengutip ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mendorong kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan. Ia menolak interpretasi Islam yang sempit dan konservatif yang hanya melihat Islam dari sisi hukum formalistik tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam pidato-pidatonya, Soekarno sering menekankan bahwa Islam harus menjadi agama yang mendorong perubahan sosial dan politik yang adil. Ia menolak pandangan bahwa Islam hanya berkutat pada masalah-masalah ritual

dan dogma tanpa memberikan perhatian pada masalah-masalah sosial dan ekonomi. Menurut Soekarno, Islam harus menjadi agama yang aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial dan melawan penindasan dalam segala bentuknya. Pandangan ini tercermin dalam gagasannya tentang "Islam Berkemajuan," yang menekankan pentingnya reformasi sosial dan politik yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Soekarno juga mengakui keragaman dalam Islam dan menghargai perbedaan pandangan di kalangan umat Islam. Ia menekankan pentingnya persatuan umat Islam dalam menghadapi tantangan bersama, terutama dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Soekarno sering mengajak umat Islam untuk bersatu dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Ia percaya bahwa persatuan dan kerjasama adalah kunci untuk membangun bangsa yang kuat dan mandiri.

Dalam konteks politik, Soekarno menolak konsep negara Islam formalistik yang didasarkan pada penerapan syariat Islam secara kaku. Ia berpendapat bahwa negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang inklusif dan bisa diterima oleh semua kelompok dalam masyarakat, termasuk umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Pandangan ini tercermin dalam Pancasila, yang ia usulkan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila mencerminkan nilai-nilai universal yang bisa diterima oleh semua kelompok dalam masyarakat, termasuk prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memberikan tempat penting bagi agama dalam kehidupan negara tanpa mengkhususkan satu agama tertentu (Nirwansyah, 2023). Namun, meskipun Soekarno menolak konsep negara Islam formalistik, ia tidak mengabaikan pentingnya Islam dalam kehidupan negara. Ia sering menekankan bahwa Pancasila bukanlah sekularisme, tetapi merupakan upaya untuk menjamin kebebasan beragama dan menghargai semua agama dalam kerangka negara yang inklusif. Soekarno percaya bahwa dengan mendasarkan negara pada Pancasila, Indonesia bisa menjadi negara yang adil dan makmur, di mana semua warga negara, termasuk umat Islam, bisa hidup berdampingan dengan damai dan harmonis.

Soekarno juga sangat memperhatikan peran pendidikan dalam memperkuat pemahaman Islam yang progresif. Ia mendukung pendidikan Islam yang tidak hanya fokus pada aspek ritual dan dogma, tetapi juga pada aspek ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Ia percaya bahwa pendidikan Islam harus membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman modern, sambil tetap menjaga nilai-nilai Islam yang mendasar (Wibowo et al., 2023). Dalam berbagai pidatonya, Soekarno sering menyerukan umat Islam untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam masyarakat. Ia mendorong umat Islam untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan sosial, untuk membawa perubahan positif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Soekarno percaya bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang, bukan hanya bagi sesama Muslim.

Pemikiran Soekarno tentang Islam mencerminkan visinya yang luas dan inklusif tentang peran agama dalam kehidupan negara. Ia melihat Islam sebagai agama yang dinamis dan progresif, yang bisa menjadi kekuatan moral yang mendorong perubahan sosial dan politik yang positif. Dengan mendasarkan negara pada prinsip-prinsip inklusif seperti yang tercermin dalam Pancasila, Soekarno berusaha menciptakan negara yang adil dan makmur, di mana semua warga negara, termasuk umat Islam, bisa hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. Melalui pendekatan ini, Soekarno berhasil menyatukan berbagai kelompok dalam masyarakat dan memastikan bahwa Islam bisa berperan aktif dalam pembangunan bangsa tanpa menimbulkan perpecahan dan konflik.

5. Konsep Islam dan Rekonsiliasi Pemikiran Soekarno

Dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia, perumusan konsep dasar negara menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pemimpin bangsa. Soekarno, sebagai salah satu tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan, sangat menyadari pentingnya memiliki landasan negara yang kuat dan inklusif untuk menjaga persatuan bangsa yang sangat beragama ini. Untuk itu, ia meminta tim persiapan kemerdekaan yang terdiri dari berbagai tokoh cendekiawan dan pemimpin politik untuk merumuskan konsep negara yang akan dijadikan dasar negara Indonesia.

Namun, dalam proses perumusan ini, terjadi berbagai perdebatan dan perselisihan, terutama di kalangan tokoh cendekiawan Islam. Kelompok-kelompok ini, meskipun memiliki tujuan yang sama untuk kemerdekaan Indonesia, memiliki pandangan yang berbeda mengenai dasar dan bentuk negara yang paling tepat untuk bangsa yang baru merdeka ini. Perbedaan pendapat ini sering kali menyebabkan kebuntuan dan ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan (Ilyas, 2020). Tokoh-tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama, serta beberapa tokoh lainnya, memiliki pandangan bahwa dasar negara Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Islam. Mereka percaya bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga sistem yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa negara yang baru merdeka ini harus mendasarkan diri pada syariat Islam untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Namun, meskipun tujuan mereka sama, perbedaan interpretasi dan pandangan tentang bagaimana Islam harus diimplementasikan dalam pemerintahan menyebabkan perdebatan yang sengit di antara mereka. Misalnya, Ki Bagus Hadikusumo menekankan pentingnya penerapan syariat Islam dalam konstitusi negara, sementara Wahid Hasyim lebih fleksibel dan terbuka terhadap kompromi dengan pandangan yang lebih inklusif. Perdebatan ini sering kali tidak menemukan titik temu karena masing-masing pihak memiliki keyakinan yang kuat terhadap interpretasi mereka sendiri mengenai peran Islam dalam negara. Salah satu momen kritis dalam perdebatan ini terjadi pada sidang-sidang Badan

Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Di sini, tokoh-tokoh Islam berusaha merumuskan dasar negara yang mencerminkan aspirasi mereka (Ilyas, 2020). Salah satu hasil dari upaya ini adalah Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat klausul "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Klausul ini dimaksudkan untuk memberikan tempat khusus bagi Islam dalam konstitusi Indonesia.

Namun, meskipun Piagam Jakarta berhasil disepakati pada tahap awal, perdebatan tetap berlanjut. Beberapa tokoh Islam merasa bahwa penerapan syariat Islam harus lebih kuat dan lebih jelas, sementara yang lain lebih mengedepankan inklusivitas dan keragaman. Ketidaksepakatan ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam pandangan mereka mengenai bagaimana negara Islam seharusnya dibentuk dan dijalankan (Al-Munawwar, 2017). Kegagalan untuk mencapai kesepakatan yang bulat di antara sesama tokoh Islam menyebabkan kebuntuan dalam proses perumusan dasar negara. Meskipun mereka semua menginginkan negara yang berdasarkan nilai-nilai Islam, perbedaan interpretasi dan pendekatan membuat mereka sulit untuk menemukan solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Melihat situasi ini, Soekarno menyadari bahwa jika perdebatan ini terus berlarut-larut, kemerdekaan Indonesia bisa terancam.

Supaya tidak terjadi kebuntuan dan proses pembahasan tidak berlarut-larut, Soekarno mengambil keputusan tegas untuk melahirkan konsep negara yang bisa diterima oleh semua pihak. Dengan pendekatan yang dikenal sebagai "Reconciler Thought," Soekarno berusaha menengahi berbagai pandangan yang bertentangan dan mencari solusi yang bisa menjaga persatuan nasional. Pada tanggal 1 Juni 1945, ia menyampaikan pidatonya yang terkenal, "*Lahirnya Pancasila*," yang mengusulkan lima prinsip dasar sebagai landasan negara. Dengan mengusulkan Pancasila, Soekarno berusaha menciptakan dasar negara yang bisa diterima oleh semua kelompok, termasuk kelompok Islam. Prinsip pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," memberikan tempat penting bagi agama dalam kehidupan negara, tetapi tidak secara khusus menyebutkan Islam, sehingga bisa mencakup semua agama yang ada di Indonesia.

Keputusan Soekarno untuk mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara bukanlah karena ia mengabaikan Islam atau tidak menghargai nilai-nilai Islam. Sebaliknya, Soekarno sangat menghormati Islam dan nilai-nilai yang diajarkannya. Namun, ia juga memahami bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragama, dengan berbagai kelompok agama dan budaya. Ia percaya bahwa dasar negara yang inklusif dan tidak mendasarkan diri pada satu agama tertentu adalah kunci untuk menjaga persatuan nasional dan mencapai kemerdekaan yang sejati (Naim, 2015). Keputusan ini diterima oleh banyak pihak, meskipun ada juga yang merasa kurang puas. Namun, pada akhirnya, Pancasila diterima sebagai dasar negara Indonesia, dan klausa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" di Piagam Jakarta dihapus dan diganti dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa" pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan visi

Soekarno dalam mencari solusi yang bisa menjaga persatuan dan keadilan bagi semua rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Pemikiran rekonsiliasi Soekarno terhadap gagasan negara kesatuan, adalah alternatif yang dipercepat oleh Soekarno mengingat cendekiawan Muslim tidak kunjung menemukan bentuk baku negara Islam. Soekarno telah memberikan waktu bagi panitia berwenang saat itu (BPUPKI), namun hanya terjadi perdebatan yang tidak ada habisnya oleh sesama Muslim sendiri, bahkan sidang perumusan bentuk negara terus menemukan jalan buntu mengingat cendekiawan Muslim Indonesia ingin mempertahankan mazhab dan aliran keislamannya masing-masing. Kondisi Indonesia saat itu tengah vacuum dari penjajah secara kondisional (bukan menang perang), penundaan proklamasi akan berakibat fatal terhadap masuknya penjajah baru. Maka pada akhirnya Soekarno mengambil jalan tengah dengan merumuskan Pancasila dimana nilai-nilai Islam tetap dihormati bahkan masuk dalam Sila-1.

REFERENSI

- Al-Munawwar, S. (2017). Islam dan Pluralisme Agama. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 16(2), Article 2. <https://doi.org/10.30631/tjd.v16i2.56>
- Aminullah, M. S. (2020). Agama dan Politik: Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara. *Jurnal Sosiologi Agama*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-03>
- Biliu, Y. (2017). Pemikiran Soekarno tentang Islamisme dan Pemahaman Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 2(2), 159–177. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v2i2.678>
- Diah, A. H. M., & Cholil, M. (2008). Perjuangan Umat Islam Melalui Politik Di Indonesia. *Journal of Al-Tamaddun*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/https://ejournal.um.edu.my/index.php/JAT/article/view/7843>
- Fadhil, A. (2014). Pemikiran Keislaman Tokoh Sosialis: Studi Kasus Soekarno Dan Gamal Abdul Nasser. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/4415>
- Ilyas, I. (2020). Islam dan Kebangsaan: Pergumulan dalam BPUPKI, PPKI, dan Piagam Jakarta. *Buletin Al-Turas*, 26(1), Article 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/bat.v26i1.13921>

- Jamil, R. N., Sumarjono, S., & Soepeno, B. (2017). Soekarno's Idea About Indonesian Revolution In 1945-1957. *Jurnal Historica*, 1(1), 12–28. <https://doi.org/https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JHIS/article/view/5097>
- Kembaren, E. E. K. (2021). Soekarno and Javanese Sovereignty Concept Case Study: Guided Democracy Era. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.33822/jpds.v2i2.5904>
- Kurniawan, D. A., & Mahardi, N. A. O. (2024). Jejak Gelar Doctor Honoris Causa Soekarno dan Pembelajaran Sejarah. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.29408/fhs.v8i1.24702>
- Mawangir, M. (2016). Soekarno dan Pemikirannya tentang Agama, Politik, dan Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.19109/jia.v17i1.643>
- Naim, N. (2015). Islam dan Pancasila: Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.21274/epis.2015.10.2.435-456>
- Nirwansyah, N. (2023). Alam Rantau Ahmad Syafii Maarif, dan Kebebasan Beragama di Indonesia. *Maarif*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.47651/mrf.v18i1.212>
- Nurdin, A. A. (2016). Revisiting Discourse on Islam and State Relation in Indonesia: The View of Soekarno, Natsir and Nurcholish Madjid. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.18326/ijims.v6i1.63-92>
- Samingan, S. (2021). Spiritualitas Islam Dalam Kajian Pemikiran Soekarno. *Nusantara; Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(7), Article 7. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i7.2021.2263-2272>
- Samingan, S. (2022). Pembunuhan Karakter Di Balik Sejarah: Soekarno Dan Komunis. *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 7(1), 74–80. <https://doi.org/10.31764/historis.v7i1.8937>
- Sanusi, A. (2018). Sikap dan Kebijakan Soekarno terhadap Islam Pasca Kemerdekaan. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v6i2.3520>
- Satriya, B., Suwirta, A., & Santosa, A. B. (2019). Ulama Pejuang dari Serambi Mekkah: Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Peranannya dalam Revolusi Indonesia di Aceh, 1945-1950. *Insancita: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia.*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.2121/incita-jisisea.v4i1.1198>

- Usman, A. (2021). Tafsir Kebudayaan Terhadap Ide Sukarno Tentang Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: Dari Sosio-Antropologi ke Pandangan Sufistik. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 17(2), Article 2.
<https://doi.org/10.14421/rejusta.2021.1702-04>
- van der Kroef, J. M. (1973). Sukarno's Indonesia. *Pacific Affairs*, 46(2), 269–288.
<https://doi.org/10.2307/2756173>
- Wibowo, R. P., Putri, B. A., Mahendra, S., & Huda, A. N. R. L. (2023). Pancasila dan Piagam Madinah: Relevansi dan Implementasinya dalam Pembentukan Etika Berbangsa dan Bernegara. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 71–81.
<https://doi.org/https://proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/view/3341>